

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN INTERNAL  
DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo)**



**SKRIPSI**

Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program S-1 Ilmu Ekonomi  
Jurusan Akuntansi

**Disusun Oleh:**

**Faishol Aziz**

**11190990**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**BANK BPD JATENG**

**2023**

## **1. Pendahuluan**

Hasil kerja suatu organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah dicapai, dapat diketahui dengan informasi akuntabilitas kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut. Informasi yang telah disediakan dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut pemerintah akan memiliki bahan untuk pengambilan keputusan guna melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun berdasarkan beberapa tahapan yaitu penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja disusun berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah bersinergi dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat diketahui dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah salah satu dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di segi pengelolaan organisasi sektor publik. Dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dibutuhkan sebuah sistem yang efektif dan saling berkoordinasi dengan aturan yang jelas untuk digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah. Penerapan sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah telah diatur dalam Inpres nomor 7, 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Seiring dengan perkembangan dinamika yang ada di pemerintahan, Kementerian PANRB memodernkan pedoman evaluasi AKIP melalui Peraturan Menteri PANRB No. 88, 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan efektif digunakan pada tahun 2022. Pada Peraturan Menteri PANRB No. 88, 2021 telah diatur mengenai alur evaluasi AKIP yang mencakup lima Langkah, yakni perumusan tujuan, evaluasi, penentuan ruang lingkup, perancangan desain evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, serta pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Pada poin perumusan tujuan evaluasi, secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. (MenpanRB, 2022a)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah gambaran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD oleh suatu instansi pemerintah. LAKIP dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. LAKIP digunakan sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi. LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No.	SKALA CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1.	➤ 90-100%	AA
2.	➤ 80-90%	A
3.	➤ 70-80%	BB
4.	➤ 60-70%	B
5.	➤ 50-60%	CC
6.	➤ 30-50%	C
7.	➤ 0-30%	D

*Sumber : <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/tingkat-penilaian-akip-rating>*

Skala pengukuran kinerja merupakan acuan yang ditentukan untuk menentukan predikat pencapaian kinerja suatu instansi.

Di Pemerintah Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran mewajibkan para aparat penyusunan anggaran sesuai sasaran yang akan dicapai, kejelasan sasaran anggaran adalah dimana target anggaran ditentukan secara jelas dan spesifik dan bertujuan agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh instansi yang bertanggungjawab atas pencapaian suatu anggaran. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas, sehingga bisa mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk tujuan yang diinginkan. (Devika Diah Precelina & Eni Wuryani, 2019). Hal ini sesuai dengan penelitian (Manullang & Abdullah, 2019) dan (Precelina & Wuryani, 2019) berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sedangkan hasil dari (Aprilianti et al., 2020) dan (Salsabila & Widajantie, 2021) berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian internal pada pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintah dapat menciptakan keseluruhan suatu proses kegiatan yang baik, sehingga hal tersebut dapat menentukan baik atau buruknya kinerja pada suatu organisasi. (Salsabila & Widajantie, 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian (Aprilianti et al., 2020) dan (Harjaningrum, 2021) berpendapat bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Sistem Pelaporan, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan laporan keuangan yang disusun dengan jujur, objektif dan transparan. Agar laporan keuangan pemerintah daerah lebih akuntabel, maka sangat penting untuk melibatkan pihak - pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan keuangan tersebut. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja Pemerintah dan mengawasi penggunaan anggaran yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Aprilianti et al., 2020) dan (Afdhal & Rahayu, 2022) menyatakan bahwa sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Fenomena yang terjadi mengenai perkembangan sektor publik di Indonesia antara lain meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Kinerja pemerintah akhir-akhir ini lebih banyak mendapatkan sorotan publik karena instansi pemerintah kurang dalam upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien, sebab adanya penilaian kinerja yang belum

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keadaan tersebut menimbulkan peningkatan atas tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah mengenai pelayanan publik agar lebih baik dan mempertanyakan nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah itu sendiri. Kinerja pemerintah daerah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah daerah. Aparatur pemerintahan sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif. Penilaian kinerja pada instansi pemerintah sangatlah penting sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian tersebut digunakan menjadi dasar penentuan keberhasilan kinerja sebuah instansi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena orientasi instansi pemerintah yaitu mengutamakan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mencari laba. Hasil pengukuran kinerja yang dicapai selanjutnya menjadi sebuah media evaluasi yang efektif untuk perbaikan.

Dalam penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara periodik, diperlukannya pengendalian atas akuntabilitas mengenai hasil evaluasi laporan kerjanya yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah secara administratif sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administratif pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud sebagai gambaran atas penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing instansi pemerintah, serta keberhasilan yang telah dicapai dalam perbaikan sebagai peningkatan untuk kualitas capaian kinerja yang diharapkan untuk periode setelahnya. Laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2020 berada pada predikat C dengan presentase 54,43% pada 2020, Kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan predikat B dengan presentase 65,46%. Dengan kenaikan predikat tersebut pemerintah kabupaten wonosobo memperoleh penghargaan atas sistem akuntabilitas eksekutif Lembaga negara dan reformasi birokrasi. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erwan Agus Purwanto melaporkan dalam situs resmi PANRB RI bahwa penyerahan hasil evaluasi nama penghargaan SAKIP dan RB merupakan pengakuan bagi instansi pemerintah. Yang mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi.

Menurut Erwan Selaku deputi PANRB, tujuan penelelitian reformasi birokrasi (RB) adalah untuk mengupayakan perbaikan disegala aspek birokrasi untuk mencapai tujuan dari bentuk birokrasi yaitu, Birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, dan mampu memberikan pelayanan masyarakat yang prima. Layanan terkait SAKIP digunakan untuk mengetahui apakah kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Bupati wonosobo Afif Nurhidayat menyatakan pencapaian nilai SAKIP dan RB tidak lepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah di Pemkab Wonosobo. Ini merupakan semangat komitmen dan langkah birokrasi yang kuat dan kokoh yang didorong oleh visi gubernur untuk mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Sekedar informasi, SAKIP dan RB Awards dilaksanakan secara daring dan luring. Kabupaten dan kota yang mengalami efisiensi atau status predikat tinggi dalam birokrasi diantara 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, gelar SAKIP dan RB naik di tiga yaitu Pemkab Wonosobo, Pemkab Banyumas dan Pemkot Surakarta. (Azis Fahrudin, 2022) <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sakip-wonosobo-raih-predikat-b/>.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan tinjauan hasil penelitian terdahulu, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : (1) Apakah ada pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo ? (2) Apakah ada pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo? (3) Apakah ada pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **2. Landasan teori**

### **2.1.1 Stewardship Theory**

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *stewardship theory*. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, kesuksesan organisasi inilah yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori *stewardship* lebih cocok digunakan dalam instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat. (Dewi, 2021)

Teori *stewardship* yang mengemukakan bahwa perilaku dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, mengutamakan kepentingan kolektif atau bersama daripada kepentingan pribadi dan selalu bersedia untuk melayani (Donaldson dan Davis, 1991). Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah sebagai *steward* yang bertugas menjadi pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakat, agar dapat dipercaya untuk bekerja sesuai dengan kepentingan publik dan instansi mereka. Dengan demikian, pemerintah harus mengelola anggaran untuk mencapai tujuan yang maksimal sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Teori ini juga dapat menjadi dasar bahwa masyarakat dapat mempercayai pemerintah untuk mengelola segala urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Teori *stewardship* cocok diterapkan pada pemerintahan karena tidak berorientasi pada laba yang diperoleh tetapi lebih mengutamakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

### **2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Anggaran yang biasanya disebut *Business Budget* (anggaran perusahaan) atau *budget* (anggaran) merupakan perencanaan yang disusun secara sistematis, yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan secara unit dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang (Irawati & Agesta, 2019).

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Aprilianti et al., 2020) Dengan adanya anggaran yang disasar dengan jelas maka pelaksanaan anggaran akan lebih mudah untuk mengimplementasikan anggaran yang ada. Hal ini akan menimbulkan motivasi untuk mencapai kinerja yang di harapkan.

Adapun karakteristik anggaran yaitu :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang di tetapkan.
4. Usulan anggaran di telaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya menyesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

### **2.1.3 Pengendalian Internal**

Pengendalian internal juga harus digunakan oleh pemerintah sebagai alat ukur agar kegiatan dalam instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat digunakan sebagai jaminan bahwa anggaran yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Salsabila & Widajantie, 2021). Pengendalian internal pada pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintah dapat menciptakan keseluruhan suatu proses kegiatan yang baik, sehingga hal tersebut dapat menentukan baik atau buruknya kinerja pada suatu organisasi.

### **2.1.4 Sistem Pelaporan**

Laporan Keuangan dalam lingkungan sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam terciptanya akuntabilitas sektor publik, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan inilah yang berfungsi untuk dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, informasi keuangan juga merupakan akhir akuntansi sektor publik. Sistem pelaporan merupakan sebuah tanggung jawab dalam pemberian informasi atas penggunaan anggaran kepada pihak eksternal, internal maupun pihak yang mempunyai kepentingan. Dalam pemerintahan sistem pelaporan merupakan suatu mekanisme yang dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan maupun kinerja. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan untuk melihat dan juga menilai kinerja dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (BPK, 2010)

### **2.1.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas instansi pemerintah, menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan manifestasi dari mencapai visi, misi dan tujuan sasaran organisasi melalui sistem akuntabilitas berkala. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai perwujudan akuntabilitas unit organisasi melalui suatu media berupa laporan pertanggungjawaban kinerja secara berkala yang memuat bagaimana individu atau unit organisasi mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang dimaksudkan adalah fasilitas penunjang yang diberikan kepada individu tau unit organisasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang telah dibebankan padanya. (Pebrianti & Aziza, 2019).

## 2.2 Penelitian terdahulu

Berikut penulis sajikan penelitian terdahulu terkait variable-variabel yang diteliti:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

PENULIS (TAHUN)	VARIABEL	HASIL
Afdhal & Rahayu (2022)	Dependen: Akuntabilitas kinerja Independen: Sistem pengendalian manajemen, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran	Sistem pengendalian manajemen, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
Erlin ayu harjaningrum (2021)	Dependen: Akuntabilitas kinerja. Independen: Analisis penerapan akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat	Pengaruh Analisis penerapan akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
Salsabila & Widajantie (2021)	Dependen: Akuntabilitas Kinerja Independen: Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia.	1. Pengendalian internal dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 2. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
Aprilianti, Wulan & Kurniawan (2020)	Dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Independen: Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan.	1. Pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2.Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Widaryanti, Nurul Latifah P (2020)	Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Independen: Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran.	1. Sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Manullang & Abdullah (2019)	Dependen: Akuntabilitas Kinerja. Independen: Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD	Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Pergantian Kepala SKPD berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Prezelina & Wuryani (2019)	Dependen: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Independen: Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan.	1. Kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Sistem pelaporan berpengaruh negative terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Isnanto, Suharno & Widarno (2019)	Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Independen: Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan.	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Pebrianti & Aziza (2019)	<i>Dependen: Performance Accountability of Government Agencies</i> <i>Independen: Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting System, Compliance With Regulation.</i>	<i>Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting System, Compliance With Regulation can improve the accountability of the Government Agencies.</i>

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya anggaran yang di sasar dengan jelas maka pelaksanaan anggaran akan lebih mudah untuk mengimplementasikan anggaran yang ada.

Sasaran anggaran yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat di bagian anggaran tidak membingungkan sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berhubungan dengan teori *stewardship* yang pada hakikatnya memotivasi pegawai bekerja keras untuk kepentingan organisasi dengan penghargaan yang tidak nyata. menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Temuan ( Manullang & Abdullah, 2019) dan (Isnanto et al., 2019) telah membuktikan bahwa dengan target anggaran yang jelas, maka akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, target anggaran target anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan dengan jelas, spesifik, dan dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sehingga penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>** :Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.3.2 Pengaruh Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah sebuah proses pada kegiatan yang dilakukan secara konstan oleh seluruh aparat pemerintah baik itu pimpinan dan pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang



memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang tepat, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Instansi pemerintah menggunakan pengendalian internal sebagai tolak ukur dalam setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini berhubungan dengan teori *stewardship* dimana organisasi harus mementingkan kepentingan bersama hal ini berhubungan dengan pengendalian internal yaitu organisasi perangkat daerah harus bekerjasama dalam melakukan kegiatan yang tepat diantaranya bekerjasama dalam melakukan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan juga ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Sehingga dengan begitu maka tujuan atas keberhasilan suatu organisasi dapat dengan mudah tercapai dan tentunya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam organisasi sektor publik pengendalian internal mempunyai beberapa tujuan agar kinerja tetap berpedoman terhadap undang-undang:

1. Mendorong efisiensi dalam segala kegiatan atau program yang dilakukan.
2. Menjaga dan melindungi aset instansi pemerintah.
3. Mendorong aparatur pemerintah mematuhi hukum dan peraturan yang telah dibuat oleh instansi.
4. Memeriksa kebenaran dan ketelitian data dalam instansi pemerintah.

Inspektorat daerah menjadi pengawas internal pada sistem pemerintahan di daerah. Inspektorat memiliki fungsi sebagai pengontrol atas penggunaan keuangan dan kinerja dari instansi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan revidi atas laporan kinerja demi terciptanya sebuah keyakinan atas keterandalan laporan kinerja. Dengan adanya keterlibatan pihak pengawas dalam sistem pengendalian internal, dalam hal ini Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Hipotesis penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh (Manullang & Abdullah, 2019) dan (Aprilianti et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

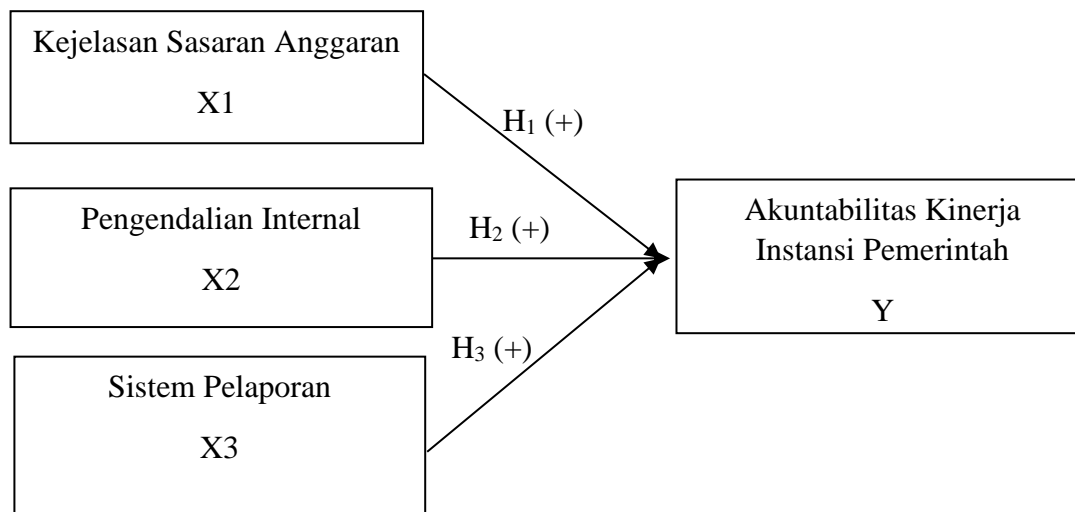
**H<sub>2</sub>:** Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **2.3.3 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem pelaporan merupakan suatu jaringan kinerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul Bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Diperlukan sistem pelaporan yang baik untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Adanya sistem pelaporan yang baik akan memberikan dampak kelancaran dalam proses penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban kinerja baik Lembaga keuangan maupun administrasi. Semakin baik sistem pelaporan suatu instansi maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja atas pengelolaan sumber daya yang digunakan instansi tersebut dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Hal ini berhubungan dengan teori *stewardship* yang menggambarkan suatu dimana manajemen lebih dominan pada sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Pebrianti & Aziza, 2019) dan (Azizah, 2020)

**H<sub>3</sub>:** Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## 2.4 Model Penelitian



## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Populasi

Populasi ialah wilayah generalisasi yang berisikan subjek maupun objek dengan karakteristik dan kualitas yang ditemukan oleh peneliti sehingga dapat dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah 25 instansi. Penelitian ini mengambil populasi di Kabupaten Wonosobo karena dilihat dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Wonosobo saat ini mengalami kenaikan predikat sakin yang disebabkan oleh banyaknya OPD yang berpartisipasi sehingga untuk saat ini berpredikat “B”.

### 3.2 Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dimana dalam pemilihannya terdapat kriteria tertentu untuk pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Kriteria responden yang menjadi sampel pada penelitian ini meliputi pejabat yang mempunyai wewenang tugas dan fungsi dalam penyajian laporan keuangan serta pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Pejabat tersebut meliputi Kepala sub bagian keuangan, staff keuangan dan bendahara.

### 3.3 Definisi Operasional

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana akuntabilitas kinerja itu sendiri merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari program maupun kegiatan dalam rangka tercapainya visi dan misi organisasi yang dilakukan secara terstruktur dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Akuntabilitas dinilai dapat mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan. Menurut (Isnanto et al., 2019) instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri atas 5 pertanyaan yang disusun berdasarkan 5 indikator serta diukur menggunakan skala interval dan skala sikap. Indikator yang digunakan dalam kuesioner ini yaitu:

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja

4. Evaluasi kinerja, dan
5. pencapaian kinerja.

### **3.3.2 Variabel Independen**

#### **3.3.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran adalah salah satu karakteristik sistem penganggaran yang menunjukkan sejauh mana anggaran ditetapkan dengan jelas agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Menurut (Isnanto, et al., 2019) Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran ini mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Tujuan
2. Kinerja
3. Standar
4. Jangka waktu
5. Skala Prioritas
6. Tingkat Kesulitan
7. Koordinasi

#### **3.3.2.2 Pengendalian Internal**

Pengendalian internal yang efektif dalam pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga terciptanya keefesienan terhadap penggunaan sumber daya yang digunakan. Sistem pengendalian internal terdiri dari komponen-komponen ataupun prosedur-prosedur yang dibuat sedemikian rupa demi tercapainya kondisi yang efektif, efisien dan relevan dalam sebuah organisasi demi keberlangsungan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Diambil dari penelitian (Harjaningrum, 2021) Variabel pengendalian internal ini mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Kegiatan pengendalian
3. Penilaian risiko
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

#### **3.3.2.3 Sistem Pelaporan**

Sistem pelaporan merupakan mekanisme yang dirangkai untuk menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan guna menyajikan laporan keuangan maupun laporan kinerja, serta memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Menurut (Widaryanti & Pancawardani 2020) indikator dari sistem pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap.
2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi.
3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus.
4. Laporan keuangan dapat diuji
5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui daftar pertanyaan kuesioner yang terstruktur dengan tujuan untuk pengumpulan informasi. Kuesioner akan diberikan langsung oleh responden, kemudian akan dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 1 minggu setelah penyerahan.

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini terdapat 5 (lima) point skala likert, dimana pemilihan 5 skala likert ini bertujuan untuk memperoleh seberapa kuat persepsi,

setuju atau tidak setuju dari responden berdasarkan pertanyaan yang nanti akan disajikan. Dimana point 1 (satu) disajikan skala yang paling rendah begitu pula sampai dengan point 5 (lima) disajikan jawaban yang paling tinggi. Berikut skor dan jawaban setiap pertanyaan yang akan digunakan dalam skala likert:

Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2: Tidak Setuju (Netral)

Skor 3: Netral (N)

Skor 4: Setuju (S)

Skor 5: Sangat Setuju (SS)

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif (Uji Rata-rata)**

Analisis statistic deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang Pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean) standar deviasi, varian, maksimum, minimum. (Ghozali, 2021)

#### **3.5.2 Uji Kualitas Data**

##### **3.5.2.1 Uji Validitas**

Menurut (Ghozali, 2021) Uji Validitas adalah uji statistic yang digunakan dalam mengukur kuesioner apakah sah atau valid tidaknya kuesioner tersebut. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat angka koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antara skor butir pertanyaan dengan skor total, yang biasa dikenal dengan metode korelasi dari Pearson.

##### **3.5.2.2 Uji Reabilitas**

Menurut (Ghozali, 2021) Reliabilitas adalah salah satu metode pengukuran yang biasanya digunakan untuk mengukur kuesioner. Ketika jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan stabil maka kuesioner tersebut dikatakan handal. Teknik yang digunakan untuk menjawab pertanyaan disini adalah Teknik *Cronbach's Alpha* dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0.70$

#### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

##### **3.5.3.1 Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2021), uji normalitas bertujuan untuk memverifikasi terdapat variabel pengganggu atau tidak dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual tersebut terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah distribusi data yang mendekati atau normal. Uji normalitas digunakan dengan uji kolmogrof-smirnov yaitu dimana jika signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan statik parametrik begitu pula sebaliknya.

##### **3.5.3.2 Uji Multikolinieritas**

Menurut (Ghozali, 2021) uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari 2 cara, yaitu nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ( $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .

### 3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2021) uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tetap, disebut dengan homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Uji glejser dilakukan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independent. Model regresi dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

1. Dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, jika signifikansi > 0,05 atau 5%.
2. Dapat diindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas, jika signifikansi < 0,05 atau 5%.

### 3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2021) regresi linear berganda yaitu menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk mengetahui bentuk hubungan yang disebabkan oleh tiga variabel dependen (X1, X2, dan X3) terhadap variabel dependen (Y), maka digunakan metode analisis regresi berganda Persamaan regresi linier berganda (*Multiple Regression*) yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dalam hal ini:

Y	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
X1	: Kejelasan sasaran anggaran
X2	: Pengendalian internal
X3	: Sistem pelaporan
$\alpha$	: <i>Intercept</i> (Konstanta)
B1, b2, b3	: Koefisien regresi
e	: Error

### 3.5.5 Koefisien Determinasi / Adjusted R Square

Uji koefisien determinasi / *adjusted r square* dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dilihat di *adjusted r square* nya bila semakin besar nilainya maka semakin besar pula pengaruh variabel dependen yang diberikan ke variabel ke variabel independen. (Ghozali, 2021)

### 5.5.6 Uji Simultan (F-test)

Uji simultan dilakukan untuk mengukur seberapa jauh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dilihat dari nilai signifikan F. Apabila nilai sig F < a (0,05) maka H1 diterima atau variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2021)

### 3.5.7 Uji Statistik t (t-test)

Uji statistik t (t-test) dilakukan untuk mengukur hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel independen. Untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen dilakukan menggunakan uji regresi linier. Apabila nilai pada tabel signifikan  $\leq a$  (0,05) maka H1 diterima atau variabel independen terdapat hubungan signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2021)